

# RASIONALITAS DEMONSTRASI ORANGTUA TOLAK SISTEM ZONASI DALAM PEMILIHAN SEKOLAH

**Agustina Nurlaili**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
agustinanurlaili16040564052@mhs.unesa.ac.id

**Agus Machfud Fauzi**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
agusmfauzi@unesa.ac.id

## Abstrak

Penolakan terhadap kebijakan seleksi zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru menimbulkan reaksi yang cukup besar di masyarakat Indonesia. Kebijakan seleksi zonasi yang diterapkan untuk meratakan persebaran fasilitas pendidikan diharapkan dapat memajukan sekolah secara merata dengan menerima siswa baru terdekat tanpa memandang label “pandai” atau “tidak pandai”. Namun aturan tersebut justru memunculkan demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua. Tindakan penolakan tersebut dilakukan oleh orangtua baik anaknya telah diterima di sekolah negeri maupun belum mendapatkan kepastian. Penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki kebijakan khusus dalam menangani masalah pendidikan, subjek penelitian adalah orangtua peserta demonstrasi tolak sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi alasan terjadinya demonstrasi, mengidentifikasi karakteristik keluarga dan kondisi objektif keluarga kemudian mengidentifikasi rasionalitas demonstrasi yang dilakukan orangtua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis realitas sosial dari tindakan demonstrasi. Teori yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tindakan demonstrasi menggunakan teori Tindakan Rasionalitas Max Weber. Teori tindakan rasionalitas menjelaskan mengenai motif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua tindakan rasionalitas yang mendasari tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua yaitu tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan tradisional. Kesimpulannya, orangtua melakukan kegiatan demonstrasi untuk menghentikan sistem seleksi zonasi sekolah. Keinginan untuk menghentikan sistem seleksi zonasi juga dipengaruhi oleh adanya pemikiran tradisional terkait *labelling* pada sekolah.

**Kata Kunci:** *Demonstrasi, Rasionalitas, Sekolah, Seleksi Zonasi*

## Abstract

The rejection of the school zoning selection policy on the admission of new students has caused quite a big reaction in Indonesian society. The zoning selection policy applied to smooth the distribution of educational facilities is expected to advance schools evenly by accepting the closest new students regardless of the label "intelligent" or "unintelligent". However, these rules actually led to demonstrations conducted by parents. The act of refusal was carried out by parents both their children have been accepted at public schools or have not received certainty. The study was conducted in the city of Surabaya as a city that has a special policy in dealing with educational problems, the research subjects were parents of participants who demonstrated the zoning system. The purpose of this study is to identify the reasons for

the demonstration, identify the characteristics of the family and objective conditions of the family and then identify the rationality of the demonstration by the parents. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to analyze the social reality of demonstration actions. The theory used to examine deeper demonstration actions using Max Weber's Rationality Action theory. The theory of action of rationality explains the motives of social actions carried out by individuals or society. The results showed that there are two acts of rationality that underlie the actions of the demonstration carried out by parents, namely acts of instrumental rationality and traditional actions. In conclusion, parents conduct demonstration activities to stop the school zoning selection system. The desire to stop the zoning selection system is also influenced by the existence of traditional thinking related to labeling in schools.

**Keyword:** *Demonstrations, Rationality, Schools, Zoning Selection*

## **PENDAHULUAN**

Di tengah konstelasi global kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari sumber daya alam, tetapi juga ditentukan dari kualitas sumber daya manusia yang ada (Warsono 2017). Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Pusat membuat peraturan pendidikan melalui Menteri Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam peningkatan pendidikan di Indonesia yaitu kebijakan terkait program wajib belajar serta adanya Kartu Indonesia Pintar (Agus, Islamiyah, and Ramadhini 2019). Adanya program tersebut kemudian mengurangi angka buta huruf serta angka putus sekolah di Indonesia dan membangun konstruksi di masyarakat bahwa menempuh pendidikan merupakan hal yang penting.

Lembaga pendidikan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menampung proses pembelajaran adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan penunjang

perkembangan pendidikan yang berfungsi untuk mendidik, mempersiapkan dan mengembangkan pribadi calon warga negara yang baik. Perbedaan sekolah dengan keluarga sebagai lembaga pendidikan yaitu sekolah mengembangkan pendidikan tidak terlepas pada peraturan yang mendasari karena lembaga pendidikan sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bentukan. Adapula beberapa karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yaitu: dibagi menjadi beberapa jenjang dengan tingkatan yang berkesinambungan, usia anak disetiap jenjang relatif berbeda-beda, waktu tempuh pendidikan relatif lama disesuaikan dengan program yang diberikan, pendidikan lebih bersifat akademis serta adanya pengukuran kualitas pendidikan sebagai wujud evaluasi kebutuhan di masa yang akan datang (Gazali 2013).

Pembangunan sekolah mulai digencarkan oleh Pemerintah pada tahun 2005 yaitu dengan membentuk Sekolah Berstandar Internasional. Tujuan

pembentukan sekolah tersebut untuk menciptakan sekolah dengan kualitas yang baik sebagai pusat keunggulan pendidikan serta memberikan naungan kepada sekolah yayasan internasional. Sekolah tersebut disebut sebagai sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) (Dharmaningtias 2013). Salah satu keunikan dari sekolah RSBI terdapat pada sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat PPDB. Sekolah RSBI memiliki kebijakan untuk melakukan seleksi baik dari bidang pengetahuan umum, pengetahuan komputer, kemampuan kecerdasan, kemampuan berbahasa Inggris serta kemampuan ekonomi. Kemunculan sekolah RSBI kemudian menjadi dasar munculnya konstruksi sosial pada sekolah. Meskipun sekolah RSBI telah ditiadakan oleh pemerintah sejak 2013 tetapi konstruksi sosial yang ada pada sekolah tersebut tetap melekat dan semakin berkembang.

Pengaruh *labelling* sekolah tidak serta-merta dapat hilang, karena dalam pelaksanaannya, mantan sekolah RSBI sudah memiliki fasilitas yang berbeda dengan sekolah reguler. Seiring dengan adanya tahun ajaran baru, mantan sekolah RSBI tetap memiliki banyak peminat. Peminat tersebut kebanyakan dari kalangan masyarakat dengan perekonomian tinggi. Beberapa *labelling* yang dibangun oleh masyarakat terkait sekolah diantaranya

sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah pinggiran, sekolah reguler dan sekolah elit.

Fenomena *labelling* sekolah kemudian menjadi alasan Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan seleksi zonasi. Harapannya ketimpangan yang terjadi antar sekolah dapat disetarakan dan tidak ada pemberian label pada sekolah. Seleksi zonasi disesuaikan berdasarkan jarak rumah dengan sekolah. Seleksi ini dilakukan secara online dan merupakan seleksi umum sehingga pelaksanaannya pun serentak dan memudahkan orangtua untuk mendaftarkan anaknya secara online. Namun, seleksi zonasi memunculkan pro dan kontra pada masyarakat serta pelaksanaannya belum efisien.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian terkait efektifitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pelaksanaan sistem zonasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh beberapa agen pendukung dari pihak sekolah namun pelaksanaannya belum mengurangi angka putus sekolah serta *labelling* sekolah (Purwanti 2018). Kedua, penelitian tentang persepsi orangtua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak menjelaskan bahwa dalam pemilihan

sekolah terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi orangtua yaitu pengalaman, ilmu pengetahuan dan sosialisasi yang didapat (Siregar 2013).

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemilihan sekolah tidak terlepas dari orangtua. Oleh karena itu, adanya kebijakan seleksi zonasi kemudian memunculkan fenomena sosial salah satunya demonstrasi. Demonstrasi penolakan sistem seleksi zonasi terjadi di beberapa kota di Indonesia. Demonstrasi sebagai aksi sadar yang dilakukan masyarakat akibat pemahaman masyarakat terhadap sistem seleksi zonasi berbeda-beda. Hal tersebut sama halnya dengan persepsi orangtua dalam memilih sekolah.

Orangtua berperan lebih dalam proses penolakan terhadap penggunaan sistem zonasi sekolah pada kegiatan demonstrasi yang terjadi. Tindakan tersebut dilakukan tidak hanya oleh orangtua yang anaknya belum diterima di sekolah negeri, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa orangtua yang anaknya sudah diterima di sekolah negeri. Tindakan penolakan yang dilakukan inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian terkait rasionalitas di balik demonstrasi yang dilakukan orangtua. Konstruksi sosial yang ada pada sekolah diciptakan oleh orangtua sebagai bagian dari masyarakat, kemudian stratifikasi sekolah juga didukung oleh pengelolaan sekolah. Salah satunya

sekolah-sekolah yang terletak di Kota Besar cenderung berkembang secara stabil dengan dukungan dari kebijakan Pemerintah Daerah. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu melakukan identifikasi kegiatan demo yang dilakukan oleh orangtua wali di Kota Surabaya sebagai kota percontohan pendidikan di Jawa Timur dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana rasionalitas demonstrasi orangtua tolak sistem zonasi dalam pemilihan sekolah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi alasan terjadinya demonstrasi tolak sistem zonasi, mengidentifikasi karakteristik keluarga dalam memahami pendidikan anak, mengidentifikasi kondisi objektif orangtua peserta demonstrasi dan mengidentifikasi rasionalitas tindakan yang dilakukan orangtua demonstrasi tolak sistem zonasi.

Berdasarkan identifikasi karakteristik keluarga di Kota Surabaya serta kondisi objektif orangtua dapat menjelaskan rasionalitas munculnya tindakan penolakan terhadap sistem zonasi sekolah. Masyarakat Surabaya yang tergolong sebagai masyarakat modern cenderung akan berani dalam menyuarakan pendapat sehingga kemunculan tindakan demo tidak menjadi hal yang mengejutkan. Akan tetapi, alasan terjadinya suatu tindakan tidak hanya

dilihat dari faktor luar kondisi masyarakat sehingga penelitian ini kemudian menggunakan teori rasionalitas untuk menemukan motif sesungguhnya dari peristiwa demonstrasi orangtua di Surabaya. Manfaat dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu sosiologi pendidikan serta sebagai acuan penelitian selanjutnya dengan tema kajian kebijakan pendidikan yaitu penggunaan zonasi sekolah sebagai bentuk seleksi penerimaan peserta didik baru di Kota Surabaya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini merupakan konsep yang dikenalkan oleh Alfred Schutz dengan meminjam konsep Max Weber untuk memahami makna/tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh individu. Asumsi dasar dari pendekatan ini bahwa individu melakukan tindakan didasari oleh suatu dorongan yang ada pada dirinya (Soekanto 2014).

Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya. Alasan pemilihan Kota Surabaya karena kota tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan. Pada saat dihapuskannya sekolah RSBI pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan Kebijakan Sekolah Kawasan yang dipilih dari mantan sekolah RSBI dan beberapa sekolah lain dengan fasilitas yang

sama dengan tujuan sebagai percontohan dan pionir kemajuan pendidikan di Surabaya. Kemudian dalam mengatasi permasalahan sistem seleksi zonasi, Pemerintah Surabaya juga melakukan perancangan kebijakan untuk membuka kuota tambahan pada seluruh sekolah negeri di Surabaya. Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Subjek penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan subjek atas beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan pemilihan subjek penelitian sebagai berikut:

- a) Mengikuti kegiatan demonstrasi tanggal 19 Juni 2019 atau 20 Juni 2019,
- b) Memiliki anak yang diterima masuk SMA maupun SMP Negeri pada PPDB 2019/2020,
- c) Bertempat tinggal di Surabaya.

Subjek penelitian adalah orangtua siswa yang anaknya ikut seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Orangtua yang menjadi subjek penelitian adalah orangtua siswa kelas 10 Sekolah Menengah Pertama. Pertimbangan tersebut karena peserta demonstrasi tolak sistem zonasi lebih didominasi oleh orangtua siswa yang anaknya akan masuk Sekolah Menengah Pertama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: wawancara, peneliti menyusun instrumen pertanyaan untuk menjawab permasalahan pada penelitian kemudian hasil dari kegiatan wawancara ditulis dalam catatan lapangan. Kedua, mengamati berita baik cetak maupun online terkait kegiatan demonstrasi yang berlangsung. Pada kegiatan observasi ini peneliti mengambil video yang diunggah disitus *Youtube* sebagai berita pendukung yang akurat dalam menyajikan siaran langsung proses demonstrasi. Ketiga, dokumentasi sebagai data pendukung dalam penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif milik Miles dan Huberman. Model interaktif Miles dan Huberman menganalisis dengan beberapa tahapan dimulai dengan pengambilan data, kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Keluarga**

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat terdiri dari dua atau lebih individu sebagai suami dan istri atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya atau ayah, ibu dan anaknya (Undang-Undang Republik Indonesia 2009). Berdasarkan beberapa tokoh, keluarga juga didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial atau perkumpulan dari beberapa individu yang memiliki keterikatan secara batiniah.

Sebagai kelompok sosial, keluarga memiliki beberapa fungsi. Friedman menyebutkan lima fungsi keluarga yaitu fungsi afeksi (keluarga memberikan kenyamanan emosional untuk satu sama lain), fungsi sosialisasi (keluarga berperan dalam menanamkan nilai dan sikap dalam menangani permasalahan), fungsi reproduksi (meneruskan keturunan dan membesarkan anak), fungsi ekonomi (memenuhi kebutuhan finansial untuk anggota keluarga dan beberapa hal di masyarakat), fungsi yang terakhir adalah fungsi fisik (memberikan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan tempat tinggal) (Friedman 2010).

Pendidikan adalah perwujudan fungsi sosialisasi dari keluarga. Keluarga sebagai tempat terjadinya sosialisasi primer pada anak sehingga proses penanaman nilai-nilai sosial pertama kali diberikan oleh keluarga. Meskipun pada kenyataannya orangtua sebagai anggota keluarga tertua cenderung memaksakan beberapa hal kepada anak. Misalnya pada pemilihan sekolah, karena orangtua cenderung merasa lebih berpengalaman (Fauzi 2019). Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh keluarga tidak lain adalah penanaman nilai dan budaya. Kemudian setelah mendapatkan sosialisasi di keluarga, anak akan mendapatkan sosialisasi di masyarakat. Sosialisasi tersebut terwujud dalam bentuk sekolah maupun teman sebaya sebagai

tempat penambahan ilmu pengetahuan bagi anak.

## **B. Konsep Sekolah**

Pendidikan merupakan media untuk mempersiapkan seseorang sebelum terlibat pada transformasi dunia dengan membangun sifat mandiri (Nuryanto 2017). Pendidikan juga sebagai proses pengembangan untuk menyiapkan dan membentuk sumber daya manusia menjadi aktor yang berguna untuk bangsa. Proses pendidikan dapat membentuk aktor yang berfungsi di bidang kehidupan, populasi, politik, ekonomi, pekerjaan, dan budaya sosial. Peran pendidikan dalam menciptakan generasi yang unggul, inovatif dan kreatif (Fauzi, Diarti, and Rohmawati 2019). Terlebih pada era saat ini dimana kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari sumber daya alam, tetapi juga ditentukan dari kualitas sumber daya manusianya (Warsono 2017).

Pendidikan di masyarakat dimulai sejak masa sekolah. Sekolah merupakan lingkungan penunjang perkembangan pendidikan bagi anak. Setelah mendapatkan pengetahuan dasar dari keluarga, anak kemudian melanjutkan pendidikannya di lembaga sekolah agar lebih berkemampuan secara intelektual dan memiliki keahlian. Hal tersebut sesuai dengan fungsi sekolah yaitu tempat untuk mendidik, mempersiapkan dan mengembangkan pribadi calon warga negara yang baik

(Munirah 2015). Perbedaan sekolah dengan keluarga sebagai lembaga pendidikan yaitu sekolah mengembangkan pendidikan tidak terlepas pada peraturan yang mendasari karena lembaga pendidikan sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bentukan. Artinya, sekolah sengaja dibentuk oleh seseorang dan di dalamnya diikat dengan peraturan serta tujuan yang akan dicapai.

Sekolah memiliki beberapa sifat diantaranya: sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, hubungan yang terjadi di sekolah tidak bersifat kodrati yang berarti antara guru dan siswa tidak memiliki ikatan darah, kemudian merupakan lembaga pendidikan formal yang berarti mempunyai fungsi, tujuan dan program pembelajaran yang jelas, teratur dan resmi. Adapula beberapa karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yaitu: dibagi menjadi beberapa jenjang dengan tingkatan yang berkesinambungan, usia anak disertai jenjang relatif berbeda-beda, waktu tempuh pendidikan relatif lama disesuaikan dengan program yang diberikan, pendidikan lebih bersifat akademis serta adanya pengukuran kualitas pendidikan sebagai wujud evaluasi kebutuhan di masa yang akan datang (Gazali 2013).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 34 tentang Wajib Belajar disebutkan bahwa pendidikan minimal di

Indonesia ditempuh selama dua belas tahun. Wajib belajar sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah dan wajib diikuti oleh seluruh warga Indonesia. program wajib belajar tersebut dimulai sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap jenjang pendidikan yang ada memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Waktu pelaksanaan yang ditempuh pada jenjang Sekolah Dasar selama enam tahun sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas selama tiga tahun (Undang-Undang Republik Indonesia 2003).

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting dalam perkembangan kepribadian anak karena pelaksanaannya sejak usia dini dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian tidak sedikit ditemukan beberapa orangtua yang melakukan seleksi untuk menyekolahkan anaknya. Seleksi sekolah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kondisi sekolah meliputi fasilitas, biaya dan program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan orangtua lebih berperan aktif dalam pemilihan sekolah dari pada anak.

Sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia sekolah memiliki faktor pendukung seperti karakteristik, lingkungan dan strategi pencapaian untuk

mencapai tujuannya. Seperti perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang dituntut untuk konsisten dan terintegrasi agar tercapai keunggulan kompetitif (Fauzi 2005).

### **C. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru**

Di Indonesia setiap tahun ajaran baru selalu diadakan penerimaan calon peserta didik baru atau yang biasa disebut PPDB. Kegiatan PPDB dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Proses penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan beberapa tahapan seleksi. Seleksi penerimaan peserta didik baru yang dikelola dan dilaksanakan secara fungsional dapat memberikan keuntungan bagi sekolah pada proses pendaftaran. Penerimaan peserta didik baru tidak terlepas dari sistem yang direncanakan, disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau yayasan yang menaungi lembaga pendidikan. Pada sistem penerimaan peserta didik baru, calon peserta diwajibkan untuk mengikuti seleksi terlebih dahulu. Seleksi dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan beberapa kriteria atau persyaratan tertentu (Sari, Imron, and Sobri 2017).

Di Indonesia sistem penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan beberapa jalur diantaranya : seleksi jalur

prestasi, seleksi jalur tes, seleksi jalur inklusi, seleksi jalur mutasi dan yang terbaru adalah seleksi jalur zonasi. Seleksi dilakukan sebagai upaya agar kuota sekolah tidak mengalami kelebihan. Pihak sekolah sendiri yang membentuk panitia pengurus dalam mempersiapkan proses pendaftaran calon peserta didik baru, melakukan seleksi penerimaan calon peserta didik dan memberikan pertanggung jawaban atas hasil seleksi yang dilakukan. Setelah itu, kepala sekolah bertugas untuk melaporkan hasil seleksi pada pemerintah bagi sekolah negeri dan kepada ketua yayasan bagi sekolah swasta.

Sejak tahun 2018 di Indonesia menggunakan sistem seleksi zonasi sekolah. Sistem tersebut didasarkan atas kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mekanisme PPDB diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2018 yang membahas sistem penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau sekolah lain sederajat. Pelaksanaannya sendiri sesuai dengan aturan Permendikbud yaitu melalui mekanisme online dan offline.

Berdasarkan pada Permendikbud No. 14 tahun 2018, setiap sekolah dibawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang tinggal di radius terdekat dengan sekolah. Minimal 90 persen dari

total jumlah calon peserta didik yang akan diterima. Keterangan lokasi tempat tinggal peserta didik diseleksi berdasarkan keterangan alamat Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru.

Permendikbud No. 14 tahun 2018 kemudian mengalami penggantian karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan. Kemendikbud kemudian mengeluarkan peraturan baru yaitu Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Pada permendikbud tersebut aturan terkait surat keterangan tidak mampu dihapuskan atau tidak diberlakukan kembali. Sedangkan untuk sistem seleksi penerimaan peserta didik baru sama dengan sistem yang sebelumnya yaitu menggunakan seleksi zonasi untuk jalur pendaftaran umum dan menggunakan nilai ujian dan prestasi non-akademik untuk jalur prestasi. Jalur zonasi dilakukan secara online sedangkan jalur zonasi dilakukan secara offline.

Beberapa tujuan sistem seleksi zonasi yaitu untuk mewujudkan pemerataan siswa dengan tidak menggabungkan si pintar dengan si pintar pada satu sekolah saja. Akan tetapi, memberikan kesempatan kepada setiap sekolah untuk memperoleh siswa yang pandai. Hal tersebut juga sebagai upaya mengurangi sekolah unggulan atau sekolah favorit. Meskipun

pada prinsipnya pendidikan tidak membeda-bedakan karena pendidikan merupakan hak yang sama bagi setiap orang (Al-Hamdi 2017).

Perubahan aturan pada sistem seleksi penerimaan peserta didik baru hingga tahun 2019 sudah mengalami tiga kali perubahan (revisi). Pertama, Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2018. Kedua, Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2018. Ketiga, Permendikbud nomor 20 tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 20 Juni 2019.

#### **D. Teori Rasionalitas**

Teori rasionalitas sebagai basis teori sosial yang dikembangkan Max Weber merupakan tindakan yang saling berkaitan dan ditujukan kepada orang lain. Menurut Weber dalam melaksanakan suatu tindakan individu juga tidak terlepas dari adanya ide. Ide merupakan hal yang nyata berbentuk simbolis yang kemudian dipandang sebagai suatu tindakan. Weber menjelaskan bahwa terdapat empat tindakan sosial yaitu :

- a. Tindakan rasionalitas instrumental, merupakan tindakan yang didasari oleh pertimbangan antara tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai keinginan.
- b. Tindakan rasionalitas tujuan, merupakan tindakan yang memandang alat hanya sebagai bentuk pertimbangan semata karena tujuan

sebenarnya yang ingin dicapai sudah ditentukan sejak awal.

- c. Tindakan tradisional, merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara tidak sadar, karena tindakan tersebut terjadi dalam bentuk refleksi berdasarkan kebiasaan.
- d. Tindakan efektif, merupakan tindakan yang didasari oleh emosi tanpa adanya perencanaan yang sadar (Wirawan 2012).

Penggunaan teori ini relevan dengan tujuan penelitian. Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua siswa selain atas dasar penolakan terhadap kebijakan zonasi pada PPDB menurut teori tindakan Weber terdapat tujuan di dalamnya. Tujuan yang tidak tampak itulah yang menjadi hal menarik dalam melakukan analisis menggunakan teori ini. Weber menyatakan bahwa tindakan individu merupakan tindakan subjektif yang mengarah pada tujuan. Kegiatan demonstrasi yang dilakukan orangtua sangat menunjukkan partisipasi orangtua terhadap penentuan pendidikan anak. Dari kenyataan itulah dengan teori tindakan sosial ini, peneliti mencoba melakukan analisis motif apa yang mendasari tindakan orangtua dalam memilih sekolah sehingga melakukan demonstrasi pada tanggal 19 dan 20 Juni 2019.

Selain Max Weber tindakan sosial juga dijelaskan oleh Alfred Schutz seorang

tokoh modern. Schutz melihat tindakan sosial merupakan sesuatu yang dapat ditafsirkan. Penafsiran tindakan yang dimaksud yaitu memahami satu sama lain dan bertindak dengan kenyataan yang sama (Wulandari 2016). Pada konsepnya, Schutz meminjam pemikiran Weber terkait rasionalitas untuk membedah konsep tindakan sosial miliknya. Ia membedah konsep tersebut menjadi dua motif atau tujuan yang mendasari seseorang melakukan tindakan sosial. Pertama, seseorang melakukan tindakan merujuk pada alasan di masa lalu atau pengalaman (*because of motive*). Kedua, seseorang melakukan tindakan didasarkan pada masa depan atau adanya tujuan yang ingin dicapai (*in order to motive*) (Kuswarno 2009).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Identifikasi Alasan Terjadinya Penolakan Sistem Zonasi**

Demonstrasi tolak sistem zonasi sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak terjadi di beberapa kota di Indonesia. Terjadi beberapa penolakan sejak pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 tahun 2018 tentang sistem penerimaan peserta didik baru. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sekolah diwajibkan untuk menerima calon peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah.

Oleh karena itu, jarak rumah dengan sekolah menjadi salah satu bentuk seleksi masuk sekolah. Apabila sebelumnya hanya digunakan acuan nilai ujian nasional maupun seleksi tes, tetapi pada tahun 2018 seleksi yang digunakan juga sesuai dengan zona rumah dengan sekolah.

Pada tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disingkat Kemendikbud kemudian melakukan revisi terhadap Permendikbud No 14 diperbarui menjadi Permendikbud No. 51 tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2018. Pada Permendikbud tersebut terdapat beberapa revisi yang salah satunya menghapuskan aturan tentang surat keterangan tidak mampu dan menambah kuota zonasi. Pada penerimaan peserta didik baru 2019/2020 didasarkan pada Permendikbud No. 51 tahun 2018. Pada aturan tersebut untuk kuota zonasi sekolah diberlakukan 90% dari total pagu sekolah. Sedangkan sisanya untuk kuota jalur prestasi dan perpindahan tugas orangtua.

Terdapat pro dan kontra terhadap ditetapkannya sistem zonasi sebagai bentuk seleksi masuk sekolah. Beberapa anak yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah akan sangat diuntungkan begitupula sebaliknya bagi beberapa anak yang lokasi rumahnya jauh dengan sekolah. Meskipun pada dasarnya tujuan dari kebijakan ini adalah untuk pemerataan pendidikan. Salah

satunya dengan meratakan antara anak yang pandai maupun tidak, bisa masuk di sekolah yang sama. Kemudian untuk orangtua agar lebih mudah memantau anak dan mengurangi biaya transportasi ke sekolah. Tujuan yang terakhir yaitu untuk menghapus label sekolah favorit sehingga sekolah-sekolah lain diharapkan mendapatkan murid dengan jumlah yang sama seperti sekolah favorit. Namun, dari beberapa tujuan yang diharapkan tidak semudah itu pada pelaksanaannya.

Keinginan untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah merupakan keinginan dari sebagian besar anak maupun keluarga. Tanpa adanya sistem zonasi hal tersebut sudah menjadi salah satu strategi pribadi dari sebagian keluarga terutama keluarga menengah kebawah untuk menyekolahkan anaknya dekat dengan rumah. Alasan dari hal tersebut adalah untuk menghemat biaya transportasi sekolah dan mengurangi risiko anak saat diperjalanan menuju sekolah. Sedangkan anak-anak yang sekolahnya jauh dari rumah cenderung anak-anak yang memang memilih sekolah terbaik. Seperti pepatah yang sering muncul di sampul buku "*Kejarlah ilmu sampai negeri cina*" pepatah tersebut apabila dipahami yaitu suatu isyarat untuk belajar kemanapun dan sejauh apapun agar memperoleh pengetahuan yang luas. Tetapi pada kenyataannya hanya beberapa masyarakat

yang mampu untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh. Dengan kata lain hanya beberapa orang yang mempunyai pilihan dalam memilih sekolah yang diharapkan. Beberapa orang tersebut cenderung orang dengan kemampuan ekonomi menengah keatas. Adapula orang dengan kemampuan ekonomi rendah kesulitan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah karena harus melewati sungai atau pegunungan.

Beberapa orang dengan pemikiran rasional juga mempertanyakan perhitungan statistika atas pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Kembali pada kondisi geografis dan persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Tidak semua wilayah di Indonesia mengalami pembangunan yang maju, terlebih lagi sebagai Negara Kepulauan yang mana akses antar pulau juga cukup sulit. Sehubungan dengan itu, pembangunan pada masa lalu hanya berfokus pada daerah-daerah pusat saja. Baik dari pembangunan industri, pendidikan dan ekonomi juga terpusat di beberapa daerah tertentu. Oleh karena itu, apabila dilihat saat ini pembangunan sekolah di daerah perkotaan lebih banyak daripada daerah pedalaman. Hal tersebutlah yang juga perlu dipertimbangkan untuk merancang peraturan yang akan diberlakukan sama di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan di kota besar memang lebih cepat mengalami perkembangan dari

pada kota-kota kecil. Namun, permasalahan lain juga mendasari beberapa orang di kota besar untuk melakukan penolakan terhadap zonasi sekolah. Salah satunya di Kota Surabaya sebagai pusat perkembangan di Jawa Timur kota ini terus menerus menarik warga pendatang. Jumlah penduduk di Surabaya berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya saat ini mencapai 3.095.026 sampai bulan Januari 2019. Jumlah penduduk di setiap Kecamatan juga berbeda dan jumlah sekolah disetiap Kecamatan juga berbeda. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan penolakan warga Surabaya atas pelaksanaan sistem seleksi zonasi sekolah.

Penolakan terhadap sistem seleksi zonasi sekolah disuarakan oleh beberapa masyarakat melalui demonstrasi. Demonstrasi menjadi fenomena yang cukup ramai di Indonesia khususnya pada bulan Mei hingga Juli tahun 2019. Salah satu demonstrasi yang cukup ramai diperbincangkan terjadi di Kota Surabaya. Peristiwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh orangtua yang anaknya mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2019/2020.

Demonstrasi yang berlangsung di Kota Surabaya terjadi selama beberapa hari. Pada saat dibukanya seleksi penerimaan peserta didik baru secara online, beberapa orangtua sudah banyak mendatangi pihak

Dinas Pendidikan. Alasan mendatangi pihak Dinas Pendidikan untuk menanyakan terkait sistem seleksi yang dilakukan. Tidak sedikit pula orangtua yang meminta bantuan Dinas Pendidikan agar anaknya diterima di sekolah negeri. Sebagian dari orangtua tersebut paham akan aturan dan birokrasi. Oleh karena itu, bentuk bantuan yang diinginkan adalah pembuatan surat rujukan untuk ditujukan kepada sekolah tertentu melalui Dinas Pendidikan. Warga yang tidak mengerti bagaimana prosedur birokrasi justru mendatangi kantor Dinas secara langsung meminta arahan agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri.

Sekelompok orangtua yang melakukan demonstrasi bertujuan agar sistem seleksi zonasi dihentikan dan dilakukan sistem seleksi menggunakan nilai ujian nasional (Ginjar 2019). Dengan demikian kembali kepada sistem seleksi sebelumnya. Penggunaan nilai dianggap lebih tepat digunakan selain untuk melihat kemampuan anak tetapi juga untuk seleksi masuk sekolah. Sebagai besar dari peserta demonstrasi juga keberatan karena banyak anak dengan nilai ujian nasional tinggi tidak dapat bersekolah di sekolah negeri. Jumlah sekolah di Surabaya juga semakin berkurang disetiap jenjangnya sehingga, tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Ketika ada seleksi zonasi, calon peserta didik baru juga tidak dibebaskan untuk memilih sekolah.

## **B. Identifikasi Karakteristik Keluarga**

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri dari beberapa orang dengan ikatan batin yang kuat. Keluarga secara sederhana biasanya terdiri dari orangtua (ayah dan ibu) dan anak. Sebagai suatu kelompok sosial, dalam pembentukannya keluarga juga mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan umumnya dilimpahkan kepada orangtua sebagai anggota keluarga tertua. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pendidikan dan pembimbingan kepada anak sebagai tugas utama dalam menjalankan fungsi pendidikan. Sebagai komponen utama, orangtua juga bertanggung jawab untuk menyiapkan anak dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan perkembangan waktu saat ini orangtua tidak hanya memberikan pendidikan secara langsung kepada anak. Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang membantu orangtua untuk memberikan pengajaran kepada anaknya. Salah satu lembaga pendidikan yaitu sekolah. Saat ini di Indonesia semua anak sudah diwajibkan untuk bersekolah selama dua belas tahun. Yang artinya menempuh tiga jenjang pendidikan sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Setiap orangtua memiliki pemahaman tersendiri dalam melihat pendidikan maupun sekolah anaknya. Seperti orangtua peserta demonstrasi zonasi di Surabaya yang memandang bahwa sekolah maupun pendidikan merupakan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, dalam memberikan lembaga pendidikan kepada anak, para orangtua melakukan seleksi tertentu dari sekolah yang akan dituju. Kebanyakan dari masyarakat perkotaan memilih sekolah dengan fasilitas yang bagus dan memiliki nama di masyarakat. Hal ini lah yang menjadi alasan pemberian label kepada sekolah yang biasa disebut sekolah favorit belum dapat dihilangkan.

Pada realitasnya kemunculan sekolah favorit itu sendiri tidak begitu saja tumbuh di masyarakat. Konstruksi akan sekolah favorit muncul karena sekolah tersebut memiliki keunggulan dibandingkan sekolah yang lain. Meskipun setiap sekolah terutama sekolah negeri mendapatkan bantuan fasilitas yang sama dari Pemerintah.

Masyarakat kota cenderung bersifat rasional dan memiliki orientasi diri menurut Talcott Parson. Hal tersebut tercermin pada pandangan terhadap pendidikan. Orientasi diri masyarakat kota cenderung pada sifat terbiasa untuk bersaing. Kehidupan di Kota membentuk sebagian masyarakat memiliki jiwa kompetitif terlebih lagi untuk bertahan hidup dan mengikuti arus pembangunan di

Kota. Hal ini relevan dengan cara masyarakat menilai bahwa sebaiknya sistem seleksi sekolah disesuaikan dengan hasil ujian yang diperoleh oleh anak. Sejak awal di sekolah anak diajarkan untuk menghadapi persaingan. Bahkan untuk itu banyak orangtua yang mengikutkan anaknya pada bimbingan belajar di luar sekolah. Persaingan tersebut memberikan kepuasan tersendiri pada masyarakat kota dalam menentukan mana yang pantas dan tidak. Adanya sistem seleksi zonasi kemudian mengakibatkan persaingan tersebut tidak berlangsung. Banyak orang merasa kecewa karena telah melakukan persiapan terlebih dahulu namun pada akhirnya harus mematuhi aturan seleksi yang ada.

Sifat rasional dari masyarakat kota sendiri yaitu cenderung memperhitungkan segala sesuatu. Mengurangi risiko dan melihat peluang yang ada. Begitulah rasionalitas yang juga berkembang pada masyarakat kota. Pada pemilihan sekolah orangtua juga melakukan beberapa pertimbangan sehingga tidak asal mengikuti aturan yang ada. Semakin banyak pilihan maka akan menjadi semakin besar peluang. Namun dengan adanya sistem seleksi zonasi jumlah pilihan sekolah semakin sedikit sehingga semakin besar risiko yang diterima apabila tidak mengurangi orientasi diri terhadap sekolah tertentu

Masyarakat Surabaya sebagai masyarakat kota memandang pendidikan lebih secara rasional dan orientasi diri. Tetapi ciri tersebut lebih terlihat dari orangtua anak meskipun anak sebagai objek utama pendidikan.

### **C. Identifikasi Kondisi Objektif Keluarga**

Kondisi objektif keluarga dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan jumlah keluarga. Kondisi objektif tersebut dapat mempengaruhi cara keluarga untuk memberikan respon pada suatu hal. Pada pendidikan anak, kondisi objektif juga mempengaruhi keluarga dalam memutuskan lama sekolah anak, dimana anak bersekolah, pembelajaran apa yang akan didapat anak dan bagaimana perkembangan pengetahuan anak. Keluarga sebagai tempat terjadinya sosialisasi primer anak sehingga penyaluran pendidikan yang paling inti didapat anak dari keluarga.

Secara objektif dilihat dari tingkat pendidikan orangtua, di Surabaya sendiri sebagian besar orangtua telah menempuh pendidikan Perguruan Tinggi. Terlebih lagi pada orangtua yang lahir dan dibesarkan di Surabaya maka secara tidak langsung akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari pada orangtua yang besar di kota kecil. Orangtua dengan lulusan perguruan tinggi mampu dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Terlebih lagi pada era teknologi saat ini. Sebagian besar dari

orangtua di Surabaya mampu untuk menggunakan internet karena sebagian besar dari pekerjaan saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet. Salah satu contohnya pada pendaftaran sekolah yang dilakukan secara online.

Kedua, dilihat dari segi pendapatan, kondisi objektif keluarga di Surabaya berada pada pendapatan menengah. Meskipun upah yang diberikan di Kota ini cukup besar tetapi biaya hidup yang dikeluarkan juga cukup banyak. Bahkan biaya untuk pendidikan di Surabaya juga cukup mahal. Oleh karena itu sebagian masyarakat memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Biaya pendidikan yang dikeluarkan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang biasa biayanya sama. Pendapatan keluarga sangat berpengaruh juga pada pilihan keluarga dalam mempertimbangkan segala keperluan.

Ketiga, dilihat dari segi pekerjaan secara objektif sebagian besar masyarakat Surabaya bekerja sebagai pegawai BUMN, PNS dan pedagang. Pekerjaan yang dikerjakan cenderung menghabiskan waktu yang banyak sehingga pekerjaan orangtua ini juga berpengaruh terhadap intensitas bertemu dengan anak. Keluarga dengan intensitas bertemu yang sedikit akan berdampak pada perilaku anak yang cenderung menjadi antisosial. Selain itu pada keluarga pekerja juga akan cenderung

tidak mengetahui perkembangan anak di sekolah maupun perkembangan pendidikan anak. Contoh kecil yang terjadi adalah tidak mengikuti perkembangan informasi penerimaan peserta didik baru, sehingga pada saat pelaksanaan merasa kebingungan dengan sistem yang diberlakukan.

Keempat, dari segi jumlah keluarga secara objektif jumlah keluarga berkaitan dengan jumlah pengeluaran keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga maka tanggungan kehidupan dari keluarga tersebut semakin besar. Di Surabaya sebagian besar keluarga terdiri dari empat sampai lima orang. Meskipun sebagai Kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur, rata-rata keluarga di Surabaya hanya berjumlah empat sampai lima orang.

#### **D. Identifikasi Rasionalitas Pemilihan Sekolah**

Sebagian besar masyarakat tidak menyalahkan bahwa tujuan adanya sistem zonasi untuk mendekatkan anak dengan sekolah. Hanya saja pada kebijakan yang diberlakukan dianggap kurang sesuai dengan wilayah Kota Surabaya. Permukiman penduduk di perkotaan cukup padat sehingga apabila diukur dengan meteran maka ukuran jarak terjauh dengan sekolah akan semakin sedikit.

Demonstrasi sistem zonasi yang terjadi pada tanggal 19 Juni dan 20 Juni 2019 merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh orangtua wali siswa.

Tindakan orangtua dalam melakukan demonstrasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya lokasi sekolah anak yang dituju jauh dengan lokasi tempat tinggal, lokasi sekolah terdekat dengan tempat tinggal berjarak kiloan meter sedangkan jumlah populasi penduduk di daerah tempat tinggal sangat padat, status anak yang belum pasti pada website penerimaan peserta didik baru, anak dengan nilai yang tinggi tidak diterima di sekolah negeri dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam alasan keikutsertaan orangtua pada demonstrasi tolak sistem zonasi, adapula tujuan dari dilakukannya demonstrasi yaitu untuk mengembalikan sistem seleksi kepada sistem seleksi berdasarkan hasil Ujian Nasional. Apabila dikelompokkan, tindakan yang dilakukan orangtua tersebut dapat terjadi karena ada faktor pendorong yang mempengaruhi.

Tokoh sosiologi Max Weber mengklasifikasikan bahwa dorongan yang mendasari tindakan seseorang tidak terlepas dari ide. Ide merupakan hal nyata yang berbentuk simbolis yang kemudian dipandang sebagai suatu tindakan. Secara umum, Weber mengklasifikasikan ide tersebut dapat bersumber dari pikiran dan perasaan. Ide yang bersumber dari perasaan akan cenderung mendorong seseorang melakukan tindakan atas dasar keinginan dan bersifat emosional. Sedangkan ide yang berasal dari pikiran akan cenderung

mendorong seseorang dalam melakukan tindakan atas beberapa pertimbangan antara alat pendukung yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua wali dapat diidentifikasi bahwa dorongan yang mempengaruhi tindakan orangtua dominan berasal dari rasionalitas instrumental dan rasionalitas tradisional.

#### A. Rasionalitas Instrumental

Rasionalitas instrumental merupakan tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh dorongan ide yang didasarkan pada pertimbangan antara tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua wali sebagian merupakan bentuk dari rasionalitas instrumental. Demonstrasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan yaitu agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri. Beberapa orangtua ikut mengadakan demonstrasi agar pihak Dinas Pendidikan merespon keluhan terhadap diberlakukannya sistem seleksi zonasi.

Selain demonstrasi terdapat alat pendukung lain yang membuka peluang para orangtua untuk mencapai tujuannya. Pertama, pelaksanaan demonstrasi di depan Gedung Graha juga bukanlah hal kebetulan. Lokasi tersebut adalah lokasi utama yang banyak dilewati oleh banyak

orang, berada di tengah kota dan merupakan pusat Pemerintahan. Beberapa hal tersebut membuka peluang yang besar bagi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua untuk menjadi pusat perhatian masyarakat maupun media. Kedua, membawa hasil ujian nasional anak. Tindakan orangtua dengan membawa hasil ujian nasional anak sebagai bukti kelayakan anak tersebut masuk sekolah negeri merupakan suatu perwujudan ide yang menjadi alat untuk menunjukkan bahwa demonstrasi yang dilakukan bukan atas dasar emosi. Ketiga, membawa anak untuk ikut serta dalam demonstrasi. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk dari alat yang digunakan orangtua dalam mencapai tujuannya. Anak merupakan pihak yang menjalankan pendidikan, sehingga dengan adanya anak tersebut menjadi jalan tengah agar pihak Pemerintah maupun Dinas Pendidikan memberikan empati kepada demonstrasi yang dilakukan oleh orangtua.

Tindakan rasionalitas instrumental yang dilakukan oleh orangtua wali pada saat demonstrasi berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan pelaksanaan demonstrasi di tempat umum yang terbuka dan berada di pusat kota menjadikan demonstrasi tolak sistem zonasi di Surabaya menjadi *viral* di media masa dan juga mendapatkan respon oleh Presiden Republik Indonesia pada saat beliau berada di Surabaya.

Kemudian dengan membawa hasil ujian nasional dari anak juga mendapatkan perhatian dari pihak Dinas Pendidikan yang kemudian memberikan sistem seleksi tambahan setelah sistem zonasi. Sistem tersebut dilakukan menggunakan seleksi nilai Ujian Nasional dipadukan dengan zona rumah dengan sekolah. Sehubungan dengan itu, tujuan orangtua untuk menambahkan nilai hasil Ujian Nasional sebagai bentuk seleksi PPDB terwujud. Tindakan ketiga yaitu dengan membawa anak pada kegiatan demonstrasi juga direspon oleh pihak Dinas Pendidikan. Pihak Dinas memberikan peluang pada siswa yang ikut demonstrasi bersama orangtuanya untuk bertemu Kepala Dinas dan menunjukkan nilai ujian nasional yang dibawa. Penggunaan alat pendukung pada tindakan yang dilakukan dapat memudahkan orangtua untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### B. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk refleksi berdasarkan kebiasaan. Demonstrasi merupakan suatu fenomena sosial di Indonesia yang sering terjadi. Demonstrasi berkembang sebagai mekanisme kontrol oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta sebagai bagian dalam penguatan moral bersama dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat serta kehormatan Pemerintah (Pranadji 2008).

Demonstrasi tolak sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru 2019 terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Surabaya. Demonstrasi yang terjadi di Surabaya dilakukan oleh orangtua yang anaknya mengikuti PPDB 2019. Demonstrasi yang cukup *viral* di Surabaya adalah demonstrasi dari orangtua wali Sekolah Dasar. Sebagian orangtua mengikuti demonstrasi karena adanya ajakan dan persamaan nasib. Oleh karena itu, tindakan ini tergolong pada tindakan tradisional.

Selain itu, tindakan tradisional juga tampak dari konstruksi orangtua terhadap sekolah. Beberapa masyarakat Kota Surabaya masih erat dengan konstruksi sosial bahwa sekolah negeri lebih baik daripada sekolah swasta. Sekolah negeri di Surabaya diberikan fasilitas yang baik oleh pemerintah salah satunya adanya sekolah kawasan sebagai bentuk sekolah unggulan. Sedangkan hanya beberapa sekolah swasta yang memiliki kualitas sekolah yang baik. Selain itu sekolah negeri di Surabaya merupakan label dari anak-anak pandai. Artinya hanya anak-anak yang pandai dan memiliki bakat yang dapat bersekolah di sekolah negeri. Dengan demikian persepsi orangtua terhadap keinginan masuk sekolah negeri di Surabaya lebih bergengsi daripada masuk sekolah swasta. Adanya konstruksi

sosial tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara tidak sadar orangtua cenderung mengusahakan anaknya untuk masuk di sekolah negeri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru disebutkan bahwa terjadi perubahan sistem penerimaan peserta didik baru menjadi sistem seleksi zonasi sekolah. Sistem zonasi sekolah merupakan sistem seleksi calon peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal dengan sekolah. Dengan demikian sekolah akan menerima calon peserta didik baru yang jarak rumahnya terdekat dengan sekolah sebanyak 90% dari total siswa baru. Pengukuran jarak tersebut diukur dengan bantuan aplikasi yaitu *googlemaps*. Perubahan sistem seleksi peserta didik baru memunculkan penolakan di masyarakat. Penolakan yang terjadi diantaranya dalam bentuk demonstrasi. Demonstrasi tolak sistem zonasi banyak terjadi di beberapa kota di Indonesia salah satunya di Surabaya. Demonstrasi tolak sistem zonasi sekolah di Surabaya dilakukan oleh orangtua wali pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2019. Tujuan Pelaksanaan demonstrasi tersebut adalah untuk memberhentikan sistem seleksi zonasi.

Orangtua yang mengikuti demonstrasi tolak sistem zonasi merasa

bahwa anaknya pantas untuk bersekolah di sekolah negeri karena memiliki nilai ujian nasional di atas rata-rata. Pada umumnya orangtua ingin agar anaknya masuk negeri untuk mengurangi biaya pendidikan sekolah. Namun terdapat alasan lain yang mendasari tindakan orangtua melakukan demonstrasi selain dari faktor ekonomi. Alasan lain yang mendasari yaitu orangtua dalam melakukan demonstrasi tersebut adalah keinginan agar anaknya bersekolah di sekolah negeri karena masih terikat pada konstruksi sosial tentang sekolah. Setiap sekolah telah mendapatkan dana yang sama dari pemerintah namun ada beberapa sekolah yang memiliki daya tarik lebih sehingga sekolah tersebut dikonstruksi sebagai sekolah favorit. Konstruksi sosial tersebut yang kemudian menjadi salah satu motif yang mendasari orangtua dalam menentukan sekolah anak.

Berdasarkan teori rasionalitas yang digagas oleh Max Weber dapat diidentifikasi bahwa tindakan yang dilakukan orangtua wali merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan tradisional. Demonstrasi sebagai bentuk penolakan orangtua terhadap perubahan sistem seleksi penerimaan peserta didik baru merupakan bentuk dari tindakan rasionalitas instrumental. Terdapat alat yang mendukung keberhasilan tujuan yang dicapai seperti penentuan lokasi

demonstrasi, mengikut sertakan anak-anak dan membawa bukti hasil nilai ujian nasional. Sedangkan bentuk dari tindakan tradisional yang mendasari alasan orangtua untuk memilih sekolah masih tidak terlepas dari konstruksi sosial pada sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Machfud Fauzi, AJ Islamiyah, and S. Ramadhini. 2019. "Indonesia Smart Card: Between Saving the Rights of Poor Students or Political Agenda." *Proceeding the 3rd International Conference on Education Innovation*.
- Al-Hamdi, Ridho. 2017. "Ketika Sekolah Menjadi Penjara: Membongkar Dilema Pendidikan Masyarakat Modern." *The Journal of Society & Media* 1(1):11–34.
- Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari. 2013. "Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)." *Politica* 4(2):263–86.
- Fauzi, Agus. 2005. "Perencanaan SDM Strategik : Mengantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis Yang Dinamis Guna Mencapai Competitive Advantage." *Ekonomi Dan Kewirausahaan* 5(2):13–30.
- Fauzi, Agus Machfud, Ayu Mega Diarti, and Ratih Rohmawati. 2019. "Student Admission through Hafidz Path Program: A Case Study of an Indonesian University." *Social Sciences, Humanities and Education Conference* 380.
- Fauzi, Agus Mahfud. 2019. "Sosiologi Keluarga Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 9(1).
- Friedman, Marilyn M. 2010. *Buku Ajar Keperawatan : Riset, Teori Dan*

- Praktik*. 5th ed. Jakarta: EGC.
- Gazali, Marlina. 2013. "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa." *Al-Ta'dib* 6(1).
- Ginanjar, Dhimas. 2019. "Respon Atas Polemik Sistem Zonasi, Proses PPDB Dihentikan Sementara." *Jawapos.Com*, June 20, 4–7.
- Kuswarno, Enkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Munirah. 2015. "Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita." *Pendidikan Dasar Islam* 2(36):233–45.
- Nuryanto, Agus. 2017. "Kritik Budaya Akademik Di Pendidikan Tinggi." *The Journal of Society & Media* 1(1):35.
- Pranadji, Tri. 2008. "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam Demokrasi Di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 26(2):132–43.
- Purwanti, Dian. 2018. "Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan." *Dinamika* 5(4):1–7.
- Sari, Asri Ulfah Wulan, Ali Imron, and Ahmad Yusuf Sobri. 2017. "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online." 1–11.
- Siregar, Nina Siti Salaniah. 2013. "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak." *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 1(1):11–27.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 46th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 52*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Warsono, Warsono. 2017. "Guru: Antara Pendidik, Profesi, Dan Aktor Sosial." *The Journal of Society & Media* 1(1):1.
- Wirawan, Ida Bagus. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Pertama. edited by Rendy. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wulandari, Silvani. 2016. "Motif Dan Makna Diri Pria Penata Rias Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fenomenologi." *Jurnal Online Mahasiswa* 3(2).